



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT KERJA : BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU CITANDUY

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUWONDO**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **215125**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.911.000.000**

1. Tanah Seluas 139 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/105 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 3830 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 6913 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
5. Tanah Seluas 2657 m2 di GUNUNG KIDUL, WARISAN Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 667 m2 di GUNUNG KIDUL, WARISAN Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 1056 m2 di GUNUNG KIDUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 90.000.000
8. Tanah Seluas 2446 m2 di GUNUNG KIDUL, WARISAN Rp. 2.100.000.000
9. Tanah Seluas 1856 m2 di GUNUNG KIDUL, WARISAN Rp. 110.000.000
10. Tanah Seluas 546 m2 di GUNUNG KIDUL, WARISAN Rp. 55.000.000



11. Tanah Seluas 2571 m2 di GUNUNG KIDUL, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 75.000.000
12. Tanah Seluas 224 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp.
71.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 151.000.000

1. MOBIL, ISUZU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 143.500.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 27.226.849**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.232.726.849**III. HUTANG** Rp. 161.690.326**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.071.036.523

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.